Prakarsa Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Proses Pendidikan

Oleh B.P. Sitepu')

Abstrak: Pada umumnya sekolah di Indonesia mengalami sejumlah masalah dalam meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Mutu dan jumlah pendidik serta tenaga kependidikan yang belum seperti diharapkan, sarana dan prasarana pembelajaran yang kurang, di samping jumlah dana vang belum mencukupi, merupakan contoh-contoh masalah yag dihadapi oleh sekolah. Akan tetapi diyakini bahwa prakarsa dan kreativitas kepala sekolah dan guru dapat mengatasi berbagai masalah pembelajaran yang dihadapi oleh sekolah. Penelitian yang mencakup 28 sekolah dasar dan sekolah lanjutan pertama yang tersebar di sembilam provinsi ini, menemukan bahwa prakarsa sekolah untuk meningkatkan mutu pembelajaran kurang didorong dan kurang dikembangkan khususnya di sekolah-sekolah tertentu milik Pemerintah. Birokrasi yang ada dan kebijakan nasional dan kebijakan daerah tidak selalu dipahami dan dilaksanakan secara tepat untuk mendukung desentralisasi sistem pengelolan sekolah. Penelian ini menyarankan sejumlah usul kebijakan untuk mendorong sekolah melakukan prakarsa dan berbuat lebih banyak dalam meningkatkan mutu pendidikan

Kata-kata kunci: prakarsa sekolah, mutu pembelajaran, strategi pembelajaran, desentralisasi pendidikan.

1. Pendahuluan

Permasalahan pendidikan nasional nampaknya sejak tigapuluh tahun lalu masih berkisar pada pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, mutu, relevansi, dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Akibatnya sampai sekarang ini keterpurukan dibidang pendidikan masih dirasakan seperti masih tingginya angka anakusia sekolah yang tidak dapat memperoleh pendidikan forma

^{*)} Dr. B. P. Sitepu, MA, adalah Dosen Universitas Negeri Jakarta.

walaupun telah diberlakukan program belajar enam tahun sejak tahun dan pendidikan dasar sembilan sejak tahun 2004. Di segi mutu mat antara lain peringkat mutu mmber daya manusia Indonesia masih tergolong rendah. Peringkat sumber daya manusia Indonesia berada peringkat ke-109 mi 174 negara di dunia dan di Asia sendiri berada pada kat ke-45 dari 48 negara yang fisurvei. Dari segi relevansi mendidikan terlihat dari tingginya pengangguran di Indonesia, matangkan dari segi efisiensi pendidikan masih terlihat mpang tindih pengelolaan program ana serta kurangnya koordinasi ak di tingkat pusat maupun di Bersh

Untuk mengatasi berbagai salah pendidikan nasional, meintah telah melakukan berbagai besar sejak diinventarisasinya lah pokok pendidikan nasional. Lah tahun tujuh puluhan Pemerintah membangun baru dan merebitasi ribuan gedung sekolah, mangkat guru baru, melengkapi bah dengan berbagai sarana dan sarana pendidikan termasuk buku, matorium, alat peraga dan praktek. Lahasarkan data tahun 2002, angka sipasi murni anak usia SD (7 –

12) tahun mengalami peningkatan (mencapai 94 %) dan anak usia SLTP (13 - 15) tahun juga meningkat (mencapai 79,8%), nilai kelulusan untuk Ujian Nasional dapat dinaikkan setiap tahun, beberapa peserta didik Indonesia berhasil meraih prestasi/ kejuaraan di bidang fisika dan matematika. Relevansi pendidikan ditingkatkan dengan menyempurnakan kurikulum secara berkala dan melalui program link dan match. Pengelolaan dana pendidikan diperbaiki dengan menata sistem penganggaran antara lain dengan melakukan desentralisasi dan pengawasan yang lebih intensif.

Salah satu langkah strategis yang dilakukan Pemerintah ialah mengubah Undang-Undang Nomor 2, Tahun 1989 dengan Undang-Undang Nomor 20, Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional. Perubahan ini diharapkan dapat memenuhi tuntutan zaman sehingga penyelenggaraan pendidikan nasional mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan-perkembangan yang ada di masyarakat. Akan tetapi usaha-usaha yang dilakukan itu belum sepenuhnya mencapai hasil seperti yang diharapkan apalagi mengingat era globalisasi semakin meluas diliputi dengan penuh persaingan termasuk dalam mutu sumber daya manusia.

Sungguhpun program wajib belajar pendidikan dasar ssembilan tahun dilaksanakan, angka partisipasi anak usia sekolah belum mencapai 100 % karena berbagai alasan, dan Pemerintah belum dapat memberikan sanksi kepada mereka yang tidak mengikuti program wajar tersebut. Di segi mutu, nilai kelulusan Ujian Nasional ternyata masih di bawah negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura sehingga sulit dapat bersaing di bidang mutu. Walaupun angka kelulusan ujian nasional setiap tahun mengalami kenaikan dan dalam tahun 2006 mencapai 4,26, tetapi masih di bawah negara-negara Asia lain yang telah mematok angka di atas 6. Prestasi yang diraih dalam berbagai lomba internasional belum mewakili mutu pendidikan secara nasional dan belum ada jaminan bahwa prestasi beberapa orang peserta didik merupakan hasil dari proses pembelajaran di sekolah. Sementara itu, angkaangka pengangguran masih memberikan indikasi relevansi pendidikan masih bermasalah. Di lain pihak, kebocoran dana di sektor pendidikan masih cukup memprihatinkan.

Penting dan strategisnya peranan pendidikan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa disadari oleh pendiri bangsa ini dan sampai sekarang ini kesadaran itu nampaknya masih menguat. Pendiri bangsa ini mencantumkan dalam pembukaan UUD 1945 bahwa salah satu tujuan kemerdekaan negara kesatuan RI adalah mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan dan dalam Pasal 31 diatur lebih lanjut. Untuk dapat melaksanakan pembangunan pendidikan secara nasional, kemudian dalam Addendum UUD 1945 Negara diwajibkan memprioritaskan anggran pendidikan sekurang-kurangnya 20 % dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaran pendidikan nasional.

Peranan dan tanggung jawab masyarakat dan orang tua pun terlihat semakin meningkat dalam menyelenggarakan pendidikan di semua jenis dan jenjang pendidikan. Secara jumlah dan mutu, perguruan tinggi swasta terus bertambah sampai ke daerah-daerah. Beberapa pemenang lomba ilmiah tingkat nasional, regional, dan internasional juga berasal dari sekolah swasta. Banyak sekolah negeri dan swasta dijadikan percontohan, berwawasan internasional, dan mengembangkan berbagai strategi dan metode pembelajaran sehingga mutu dan hasil pembelajaran cukup membanggakan. Semua prestasi ini dicapai tidak terlepas dari peran serta masyarakat dan orang tua.

Akan tetapi perlu juga disimak penelitian dan pengamatan menunjukkan bahwa pengasarana dan prasarana, tenaga, dana tidak serta merta meningkatkan mutu proses dan hasil membelajarkan di sekolah. sekolah dapat memberikan manan pendidikan yang baik pembelajaran bermutu, mezuh pun memiliki sarana was san yang terbatas dan kurang guru dan tenaga kepenwang terkesan seperti Di sekolah yang demikian miliat proses pembelajaran yang kreatif, efektif dan menyemedian dengan hasil belajar yang dibanggakan. Ternyata memasilan pembelajaran yang makian terletak pada prakarsa yang was an oleh guru dan kepala dalam mengelola pembe-Pendidikan memang tidak tetapi pendidikan bermutu selalu berarti mahal. Dalam emesisi Pemerintah belum dapat menediakan anggaran yang cukup penyelenggaraan pendidikan masyarakat juga akibat ekonomi yang sulit, - sarsa sekolah menjadi sangat meningkatkan upaya meningkatkan pendidikan.

Mengamati prakarsa sekolah dapat mengatasi berbagai masalah pembelajaran, perlu diketahui prakarsa sekolah yang telah dilakukan, landasan pengembangan prakarsa, prasyarat berkembangnya prakarsa, dan faktor pendukung serta penghambat berkembangnya prakarsa dalam peningkatan efektivitas pembelajaran.

Untuk memperoleh jawabannya. Staf Ahli Mendiknas Bidang Mutu Pendidikan, Dra Harina Yuhetty. MPd., memprakarsai dan mengetuai penelitian bersama Prof. Dr. Yusufhadi Miarso, M.Sc. (sebagai wakil ketua) dan dengan sejumlah anggota peneliti termasuk penulis antaranya. Hasil penelitian itu diharapkan dapat bermanfaat sebagai salah satu masukan bagi Pimpinan Departemen Pendidikan Nasional dalam merumuskan kebijakan lebih lanjut berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan khususnya di tingkat pendidikan dasar.

2. Kajian Pustaka

Untuk penyusunan instrumen, analisis dan intrepretasi data dalam penelitian ini, dilakukan kajian pustaka yang berkaitan dengan (a) prakarsa, (b) mutu pendidikan, (c) faktor yang mempengaruhi mutu pendidikan, dan (d) prakarsa sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan.

2.1 Prakarsa

Prakarsa merupakan kemampuan untuk memulai atau menindaklanjuti rencana atau tugas secara energetik. Prakarsa juga merupakan tindakan awal atau dalam melaksanakan suatu gagasan oleh seseorang atau suatu organisasi. Munculnya prakarsa dapat datang dari luar atau dari dalam diri seorang atau organisasi. Oleh karena itu pakarsa dibedakan dari inovasi, karena inovasi merupakan suatu obyek, gagasan atau benda yang baru bagi mereka yang menggunakannya.

Prakarsa diperlukan oleh organisasi termasuk sekolah untuk meningkatkan kinerjanya sehingga dapat berkembang. Di lingkungan sekolah, prakarsa dapat berasal dari kepala sekolah, guru, peserta didik, komite sekolah, orang tua dan pemerintah daerah. Berbagai kebijakan dan konsep pendidikan yang diperkenalkan seperti Cara Belajar Aktif (CBSA), Belajar Berbasis Kompetensi, Manajemen Berbasis Sekolah, dan Standar Penyusunan Kurikulum memerlukan prakarsa sekolah untuk dapat diterapkan secara operasional di sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan.

2.2 Mutu Pendidikan

Terdapat berbagai pendapat tentang pengertian mutu pendidikan dan masing-masing pendapat didasarkan pada sudut pandang dan kondisi yang berbeda. Sallis (1994) misalnya, menyebutkan setidak-tidaknya ada 11 faktor yang dapat dijadikan acuan untuk mutu pendidikan, yaitu: (1) gedung yang terawat baik, (2) guru yang bermutu, (3) nilai-nilai moral yang tinggi, (4) hasil ujian yang sangat baik, (5) spesialisasi program dan produk, (6) dukungan orang tua, (7) sumber belajar yang baik, (8) penerapan teknoloi yang mutakhir, (9) kepemimpinan yang kuat dan terarah, (10) kepedulian dan perhatian terhadap peserta didik, dan (11) kurikulum yang seimbang, atau beberapa kombinasi dari faktor-faktor tersebut. Sedangkan Morrison, Mohaski & Cotter (2005) menemukan indikator mutu pendi-dikan yang dikelompokkan ke dalam 10 kategori, yaitu: (1) lingkungan fisik yang kaya dan merangsang, (2) iklim kelas yang kondusif untuk belajar, (3) harapan yang jelas dan tinggi para peserta didik, (4) pembelajaran yang koheren dan berfokus, (5) wacana ilmiah yang merangsang pikiran, (6) belajar otentik, (7) asesmen diagnostik belajar yang teratur, (8) membaca dan menulis sebagai kegiatan yang (10) pemikiran yang matematis, (10) penggunaan teknologi yang era efektif. Kesepuluh kategori itu erajutnya dikembangkannya menmenjadi 42 indikator.

Di Indonesia untuk mempermbarui sistem pendidian nasional sekaligus untuk meningkatkan mutu pendidikan secara nasional, with ditetapkan Undang-Undang Somor 20, tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah RI Nomor 19, tahun 2005 standar Nasional Pendidikan kebijakan-kebijakan yang mengikutinya. Bab XI Undang-Undang Nomor 20, tahun 2003 menyebutkan perlunya menetapkan sandar nasional pendidikan bekaitan dengan standar isi, proses, ampetensi lulusan, tenaga kepenfidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan menilaian pendidikan. Pasal 19 ayat Bab IV Peraturan Pemerintah RI momor 19, tahun 2005 tentang Standar Wasional Pendidikan, menentukan mahwa proses pembelajaran pada man pendidikan dilakukan secara meraktif, inspiratif, menyenangkan, menantang memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi makarsa, kreatifitas, dan kemandirian sesuai bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik

UU tentang Sisdiknas juga menetapkan visi, misi, dan strategi pembangunan pendidikan nasional. Terkait dengan visi itu telah ditetapkan serangkaian prinsip yang dijadikan landasan dalam pelaksanaan reformasi pendidikan. Salah satu prinsip tersebut ialah bahwa pendidikan diselenggarakan sebagai proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Dalam proses tersebut harus ada pendidik yang memberikan keteladanan dan mampu membangun kemampuan, serta mengembangkan potensi kreatifitas peserta didik. Prinsip tersebut menyebabkan adanya pergeseran paradigma proses pendidikan, dari paradigma pengajaran ke paradigma pembelajaran.

Paradigma pembelajaran memberikan lebih banyak kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi dan kreativitas dirinya. Pergeseran paradigma ini membawa implikasi bahwa kebhinekaan budaya, keragaman latar belakang dan karakteristik peserta didik perlu mendapat perhatian dalam sistem pembelajaran dengan tetap memperhatikan standar nasional pendidikan.

2.3 Faktor Yang Mempengaruhi Mutu Pendidikan

Faktor yang mempengaruhi mutu pendidikan termasuk (a) perkembangan ilmu pengetahuan dan teknolgi, (b) pengaruh globalisasi, (c) perubahan masyarakat, dan .(d) perubahan paradigma pendidkan. Ilmu pengetahuan berkembang pesat dengan melahirkan dan mengembangkan berbagai teori baru untuk mengungkapkan kebenaran dan pembenaran yang dapat diterima oleh akal manusia. Perkembangan ilmu pengetahuan didorong oleh sikap ingin tahu yang kemudian difasilitasi oleh sikap dan metode ilmiah. Sikap yang demikian perlu ditanamkan dan dikembangkan pada diri peserta didik sesuai dengan perkembangan fisik dan psikologinya.

Teknologi sering diartikan sebagai wujud penerapan ilmu pengetahuan. Jacques Ellul (1967) mendefinisikan teknologi sebagai keseluruhan metode yang secara rasional mengarah dan memiliki ciri efisiensi dalam setiap kegiatan manusia. Teknologi selain memiliki nilai tambah, juga berfungsi sebagai sarana untuk memecahkan masalah secara sistematis serta telah berkembang sedemikian rupa sehingga mempengaruhi kehidupan masyarakat. Dewasa ini kemajuan

suatu masyarakat atau bangsa sering diukur dari kemajuan teknologi yang dipergunakan. Teknologi informasi dan komunikasi telah mampu membuat komunikasi antarmanusia menjadi lebih cepat, akurat, terbuka dan hampir tidak dapat dibendung. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi itu tentu dapat dimanfaatkan untuk keperluan pendidikan serta menjadi bagian integral sistem pendidikan nasional. Hal ini akan menuntut perubahan dalam desain pembelajaran, peranan guru dan peserta didik dalam satuan pendidikan

Globalisasi berarti proses penyebaran hasil karya dan pemikiran suatu budaya sehingga melembaga dalam kebudayaan di seluruh dunia. Penyebab utama terjadinya globalisasi ialah adanya kebutuhan, keinginan, ketidakpuasan, pergaulan dan persaingan. Pada saat ini dan masa yang akan datang pengaruh globalisasi akan semakin nyata dengan semakin tersedianya berbagai sarana transportasi, saluran dan sarana komunikasi sebagai salah satu wujud aplikasi teknologi informasi komunikasi dan Globalisasi memberikan dampak positif dan negatif. Persoalannya ialah bagaimana agar bangsa Indonesia di kemudian hari dapat bersaing dan ekolaborasi dengan bangsa lain di en globalisas serta bagaimana enpak negatif globalisasi itu dapat ekorangi melalui proses pendidikan.

Masyarakat mengalami perudari waktu ke waktu. Alvin Tiffer (1981) berpendapat bahwa erjadi tiga gelombang perubahan masyarakat, mulai dari masyaagraris ke masyarakat industri. kemudaian ke masyarakat mformasi. Sementara itu sejalan megan perkembangan peradaban manusia, berdasarkan pengamatan W. Gilley dan Steven A. Eggland 1989), delapan cara belajar manusia belajar secara pribadi, dalam mekungan keluarga, dalam lingkungmasyarakat, dalam lingkungan adatan, di sekolah, di perguruan imegi, di tempat bekerja dan dengan media. Pada era praindustri belajar banyak terjadi pada lingkungan warga, masyarakat dan periba-Pada era industri, sekolah, seguruan tinggi dan media sangat menonjol. Sedangkan pada era momasi, pribadi, sekolah, perguruan megi, tempat kerja, dan media lebih perperan. Di Indonesia selain perubahan-perubahan seperti yang mah disebutkan, terjadi juga mubahan pengelolaan pendidikan pola sentralisasi ke desentralisasi abagai akibat dari pelaksanaan sentralisasi dan otonomi daerah

Sistem pendidikan formal dewasa ini berawal dari jaman revolusi industri yang membutuhkan tenaga kerja untuk menangani pekerjaan pabrik. Sistem pendidikan ini memiliki ciri efisiensi dan keterukuran, serta menghasilkan tenaga kerja siap pakai. Dalam era informasi sekarang ini, peserta didik dapat memperoleh informasi beribu-ribu topik dalam hitungan menit. Mereka tidak perlu disiapkan untuk tenaga kerja pakai tetapi untuk memperoleh kecakapan hidup (life skills) dan keterampilan yang menolong mereka memperoleh pekerjaa pada era sekarang dan yang akan datang. Mereka perlu belajar begaimana memilah-milah informasi. membuat keputusan, serta bekerja sama dengan orang lain. Dengan demikian, pada era informasi sekarang ini pandangan terhadap pendidikan pun berubah. Misalnya, ruang kelas tidak lagi dianggap sebagai dunia belajar membelajarkan, tetapi dunia menjadi ruang kelas; buku tidak lagi dianggap sebagai alat utama, tetapi teknologi berperan sebagai alat utama; dari berfokus pada guru menjadi berfokus kepada peserta didik, dari pembelajaran bersaing menjadi pembelajaran kooperatif dan kompetisi antarrekan kelas menjadi kolaborasi dengan komunitas pembelajar (Belt: 1999). Di Indonesia

pergeseran paradigma atas pendidikan itu terlihat jelas dari perubahan UU tentang Sisdiknas dar Nomor 2, Tahun 1989, menjadi Nomor 20, Tahin 2003 yang telah mengukuhkan berbagai usaha pembaharuan dalam pendidikan.

2.4 Prakarsa Sekolah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan

Untuk meningkatkan mutu pendidikan, sekolah dapat melakukan berbagai prakarsa dalam proses pembelajaran. Sungguh pun mutu pendidikan dipengaruhi oleh jumlah dan mutu pendidik, tenaga kependidikan, kurikulum, sarana dan prasarana, serta dana, proses pembelajaran merupakan titik pusat kegiatan pendidikan. Oleh karena itu, dalam meningkatkan mutu proses pembelajaran terdapat berbagai model pembelajaran yang dapat diterapkan oleh guru, seperti model pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan (PAKEM), belajar berbasis maalah (BBM), pemetaan konsep, pembelajaran kontekstual, belajar mandiri, belajar tuntas, belajar kooperatif, pembelajaran berbasis komputer (PBK), dan pembelajaran dengan aneka sumber. Dalam memilih model-model pembelajaran, guru perlu memperhatikan tujuan pembelajaran, karakteristik bahan ajar, karakteristik peserta didik, alokasi waktu, serta lingkungan pembelajaran.

Di samping menerapkan model pembelajaran yang sesuai, sekolah diharapkan juga dapat mengembangkan kurikulum. Mulai tahun ajaran 2007, setiap satuan pendidikan harus mengembangkan sendiri kurikulum berdasarkan panduan yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Untuk mendukung kegiatan pendidikan di sekolah sesuai dengan tuntutan kurikulum, diperlukan dana yang menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dalam pelaksanaan program wajib belajar pendidikan 9 tahun, pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) UUD 1945. Dana pendidikan dikelola berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akunabilitas publik. Di samping itu, untuk meningkatkan mutu pendidikan sekolah juga diharapkan dapat berprakarsa dalam mengembangkan sistem penilaian. hasil pendidikan serta partisipasi masvarakat.

3. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan menggumakan pendekatan kualitatif khususma fenomenalogis dengan mengunimgi dan mengamati 28 sekolah yang andiri atas 12 SD dan 16 SMP/MTs dan tersebar di sembilan provinsi. waitu Sumatera Barat, Banten, DKI lakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Bali Sulawesi Selatan, Sekolah/ madrasah yang diteliti memang dipilih secara beragam, mulai yang berstatus negeri dan swasta, regular, unggulan. laboratorium, binaan provek, percontohan, dan alternatif. Sekolah/ madrasah tersebut dipilih secara purposif sesuai dengan tujuan penelitian serta informasi yang dimiliki meh peneliti tentang status sekolah/ madrasah.

Penelitian ini hanya meliputi majang pendidikan dasar dengan pendidikan dasar dengan penimbangan bahwa jenjang tersebut merupakan sasaran wajib belajar. Imalah sekolah yang diteliti bukan merupakan sampel yang representatif, dan karena itu hasil penelitian diak dimaksudkan untuk digenerasikan. Penelitian yang dilakukan malai bulan April sampai dengan Juli memfokuskan pada proses melajaran yang merupakan mponen utama dalam usaha meningkatkan mutu hasil pendidikan.

Data dikumpulkan dari kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan lainnya melalui penyebaran angket, wawancara, pengamatan dan studi dokumen dengan menggunakan instrumen angket, pedoman wawancara, dan format pengamatan. Data diolah, dianalisis, dan disimpulkan dengan prosedur dan teknik penelitian kualitatif dan secara khusus penelitian fenomenalogis.

4. Hasil Penelitian

Selaras dengan permasalahan penelitian, hasil penelitian dikelompokkan pada (a) prakarsa sekolah yang telah dilakukan, (b) landasan pengembangan prakarsa, (c) prasyarat berkembangnya prakarsa, dan (d) faktor pendukung serta penghambat berkembangnya pra-karsa dalam peningkatan efektivitas pembelajaran

4.1 Prakarsa sekolah

Kepala sekolah dan guru di sekolahsekolah yang diteliti memahami prakarsa sekolah secara berbedabeda. Di sekolah-sekolah negeri ada yang menganggap prakarsa sekolah adalah cara sekolah mencari dan menggunakan sumber daya yang tersedia di sekolah atau yang diberikan oleh Pemerintah; ada pula yang memaknainya sebagai tero-

bosan atau inovasi yang dilakukan oleh kepala sekolah dan/atau guru dalam menyelenggarakan pendidikan di sekolah; ada lagi yang mengartikannya sebagai upaya-upaya yang dilakukan sekolah dalam mengatasi masalah-masalah di sekolah; dan yang lain menganggap prakarsa sekolah ialah kegiatankegiatan yang diprogramkan oleh sekolah dalam setiap tahun pelajaran. Pada hal yang diharapkan sebagai prakarsa sekolah adalah dengan wewenang dan kemampuan yang dimiliki kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan, sekolah melakukan kegiatan-kegiatan secara mandiri untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran. Akan tetapi di sekolah-sekolah swasta pada umumnya kepala sekolah atau guru memahami prakarsa sekolah sebagai daya atau kemampuan sendiri untuk memulai suatu suatu tindakan untuk meningkatkan mutu pembelajaran tanpa pemberdayaan dari pihak lain. Pemahaman seperti ini mendorong sekolah swasta untuk kreatif berprakarsa dalam pengelolaan sekolah kususnya dalam pembelajaran sehingga mampu bersaing dan berkolaborasi dengan sekolah dan pihak-pihak lain agar tetap dapat memperoleh peserta didik dalam jumlah yang memungkinkannya bertahan dan berkembang.

Wujud nyata prakarsa dalam proses pembelajaran yang dimaksudkan oleh kepala sekolah dan guru adalah berupa variasi strategi pembelajaran yang dilakukan oleh guru seperti penerapan Pakem dan pembelajaran kontekstual, pembelajaran berbasis masalah, peta konsep, belajar mandiri, belajar tuntas, pembelajaran berbantuan komputer, dan pembelajaran dengan berbagai sumber.

Prakarsa guru dalam menerapkan strategi pembelajaran terlihat berbeda di antara sekolah negeri dan sekolah swasta atau antara sekolah reguler dengan sekolah binaan proyek, sekolah koalisi, sekolah unggulan atau sekolah percontohan, dan sekolah alternatif. Sunguh pun guru di sekolah reguler menyatakan bahwa mereka menerapkan hampir semua jenis strategi pembelajaran tersebut tetapi pengamatan di kelas menunjukkan bahwa strategi pembelajaran masih berpusat kepada guru dengan susunan dan suasana kelas yang masih konvensional. Apalagi keterbatasan sarana yang tersedia di sekolah seperti komputer mengakibatkan guru tidak dapat menerapkan strategi belajar berbantuan komputer dan sekolah tidak memiliki prakarsa untuk mengadakan perangkat komputer itu karena berbagai

Masan. Keadaan seperti ini nampakma tidak terjadi di semua sekolah maler. Terdapat juga sekolah reguler mag mencoba berprakarsa dalam merapkan strategi-strategi belajar dengan mendayagunakan bermaai sumber daya yang ada di ekolah dan lingkungannya.

Sekolah swasta terlihat bermaya sedapat mungkin menerapkan berbagai strategi pembelajaran agar sussana dan proses pembelajaran with aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan. Hal yang sama juga terlihat di sekolah-sekolah yang masuk sekolah binaan proyek, wolah koalisi, sekolah unggulan percontohan serta sekolah matif. Di sekolah-sekolah tersebut mihat pemanfaatan alam sebagai member belajar dan laboratorium angga ruang kelas tidak lagi hanya meatasi oleh dinding-dinding, atau sem ruang kelas berpindah (moving serta berbagai teknik evaluasi kreatif dan dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Pakarsa dalam membuat proses membelajaran lebih efektif antara lain mat dalam bentuk kegiatan di luar ingkungan sekolah seperti Out backing Fun Adventure (OTFA), Deservation (TO), dan Student Comp (SC). Melalui kegiatan ini peserta didik diharapkan memiliki

kemampuan bekerja sama, berkompetisi secara sehat, mengalahkan rasa takut, dan peka terhadap lingkungan sosial dan lingkungan alam sekitarnya.

Prakarsa sekolah dalam meningkatkan mutu proses pembelajaran juga mengikutsertakan orang tua dalam berbagai bentuk, antara lain pada hari orangtua (parents day). Pada hari itu orang tua diminta sebagai nara sumber dengan memberikan ceramah atau melakukan kegiatan pembelajaran dalam bentuk praktek kerajinan tangan atau keterampilan lainnya.

4.2 Landasan Pengembangan Prakarsa Sekolah

Landasan sekolah dalam melakukan prakarsa adalah tuntutan kurikulum, kerja sama dengan lembaga pendidikan di luar negeri, sistem penilaian, dana yang diberikan oleh Pemerintah dan kepuasan peserta didik dan orang tua. Prakarsa tersebut termasuk pengembangan bahan ajar, penentuan strategi pembelajaran dan sumber-sumber belajar serta teknik evaluasi.

Perubahan kurikulum dari Kurikulum 1994 ke Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) menuntut perubahan pada bahan ajar, strategi pembelajaran, dan teknik

evaluasi hasil belajar peserta didik. Tuntutan KBK itu mendorong sekolah menggunakan berbagai pendekatan, metode, dan model pembelajaran yang dalam pelaksanaannya memerlukan prakarsa kepala sekolah dan guru. Dalam kondisi tertentu kepala sekolah dan guru dapat Ieluasa berimprovisasi mengembangkan KBK sedangkan di sekolah lain kepala sekolah dan guru kurang atau tidak dapat berprakarsa melaksanakan dan mengembangkan kurikulum karena berbagai keterbatasan seperti kurangnya pemahaman guru atas kurikulum itu sendiri atau keterbatasan sarana dan prasarana.

Keinginan sekolah swasta meningkatkan mutu lulusan agar dapat menarik lebih banyak peserta didik antara lain diwujudkan dengan mengadaptasi kurikulum dari sekolah di luar negeri atau dengan melakukan kerja sama dengan lembaga pendidikan di luar negeri khususnya dalam mengembangkan kurikulum dan tenaga guru. Sekolah dengan sebutan sekolah koalisi atau sekolah berwawasan internasional itu menunjukkan berbagai bentuk prakarsa dalam kegiatan belajarmembelajarkan sehingga tampil berbeda dengan sekolah lain.

Penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh,

menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik. Selain penilaian berbasis kelas, beberapa sekolah melakukan penilaian otentik yang dapat mengukur penerapan pengetahuan dalam berbagai konteks atau situasi dalam kehidupan sehari-hari. Selain berbagai bentuk penilaian yang baku seperti penilaian ujian nasional dan penilaian sekolah untuk aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik pada semua mata pelajaran, terdapat pula beraneka ragam cara penilaian seperti penilaian tertulis, penilaian portofolio, penilaian melalui pengamatan/observasi, penilaian atas karva peserta didik, penilaian berdasarkan kepuasan peserta didik, penilaian perilaku, kedisiplinan, kebersihan, penilaian dengan pemasangan informasi peta kemajuan peserta didik, dan penilaian diri sendiri. Masih dalam rangka peningkatan mutu proses pembelajaran, terdapat juga sekolah yang melakukan penilaian peserta didik terhadap kinerja guru di samping setiap guru sendiri melakukan penilaian diri sendiri (self assessment).

Bantuan yang diberikan Pemerintah dan/atau lembaga lain dalam bentuk dana atau sarana di sekolahsekolah dengan status sekolah koalisi, sekolah binaan proyek,

sekolah unggulan atau sekolah percontohan dapat memicu tumbuh dan berkembangnya prakarsa sekolah dalam meningkatkan mutu proses pembelajaran misalnya dalam bentuk pelatihan guru dan kepala sekolah, pertukaran guru dan peserta didik, dan pemanfaatan sarana dan masarana belajar. Prakarsa seperti ini ralihat secara jelas di sekolah-sekolah binaan SEAMOLEC dan USAID. Akan tetapi di banyak sekolah, dana bantuan Pemerintah dalam bentuk BOS atau BOP kurang dapat menakung prakarsa sekolah karena tata pemanfaatannya diatur secara emusat dan sangat ketat.

Landasan lain untuk prakarsa sekolah ialah harapan orangtua dan masyarakat yang menghendaki meningkatan mutu lulusan sekolah itu. Untuk memenuhi harapan itu kepala skolah dan guru berupaya memberikan pelayanan pendidikan susnya dalam kaitan langsung dengan proses pembelajaran. Dalam upaya yang demikian sekolah mengajak orang tua dan masyarakat memeran serta dalam memikirkan dan melakukan terobosan-terobosan membelajaran. Namun, prakarsa yang mikian kurang berkembang di skolah-sekolah negeri yang reguler tarena terikat dengan berbagai meulasi yang kurang mendukung

sekolah melakukan penggalangan sumber daya di luar yang disediakan Pemerintah.

4.3 Persyaratan Berkembangnya Prakarsa

Tumbuh dan berkembangnya prakarsa sekolah dalam meningkatkan mutu proses pembelajaran dipengaruhi oleh: (a) tersedianya sarana dan prasarana pendidikan, (b) kemampuan guru, (c) motivasi guru untuk berubah (d) kepemimpinan kepala sekolah, (e) sikap pengawas dan (f) kebijakan pimpinan daerah dan/atau kebijakan yayasan. Bagi kebanyakan kepala sekolah dan guru sarana dan prasarana yang tersedia di sekolah menentukan pelaksanaan prakarsa sekolah dalam meningkatkan mutu pembelajaran. Dengan demikian, sebenarnya prakarsa yang dimaksudkan oleh kepala sekolah dan guru lebih bersifat kondisional. Semakin lengkap sarana dan prasarana tersedia di sekolah dianggap semakin memungkinkan kepala sekolah berprakarsa dan sebaliknya. Akan tetapi pendapat yang demikian tidak berlaku untuk semua sekolah karena terdapat juga sekolah yang berkekurangan dalam sarana dan prasarana tetapi cukup berprakarsa dalam meningkatkan mutu pembelajaran.

Kemampuan guru dari latar belakang pendidikan dan pengalaman dianggap memberikan andil yang berarti dalam tumbuh kembangnya prakarsa sekolah. Guru yang memperoleh kemampuan lebih melalui program pendidikan dan pelatihan atau yang telah memiliki pengalaman mengajar yang cukup lama melakukan prakarsa yang lebih banyak dan lebih unggul. Oleh karena itu, guru menghendaki agar Pemerintah menyelenggarakan pendidikan atau pelatihan untuk meningkatkan kemampuan guru melakukan prakarsa dalam melakukan pembelajaran yang bermutu.

Perubahan yang muncul dalam kinerja guru atas dasar prakarsa yang mandiri juga tidak terlepas dari motivasi guru untuk berubah. Motivasi tersebut dapat datang dari diri guru itu sendiri atau dari luar. Semakin kuat motivasi untuk berubah semakin banyak prakarsa yang dapat muncul. Tumbuh dan menguatnya motivasi itu terkait dengan pribadi guru itu sendiri serta kondisi sekolah.

Kepala sekolah dengan polapola kepemimpinannya ikut menentukan berkembang tidaknya prakarsa guru dalam meningkatkan mutu proses pembelajaran. Banyak guru berpendapat bahwa cara-cara kepala sekolah memimpin serta bekerja sama

secara demokratis dan sebagai teman sejawat menggugah guru untuk aktif melakukan berbagai kegiatan pembelajaran. Akan tetapi kepala sekolah yang kurang atau tidak akomodatif terhadap pendapat dan upaya-upaya guru mengurangi semangat guru untuk berprakarsa. Memberikan kepercayaan dan keleluasaan kepada guru untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya dalam membelajarkan berakibat positif terhadap pelaksanaan prakarsa guru dalam memberikan aneka pengalaman belajar kepada peserta didik. Hal ini terlihat secara nyata di sekolahsekolah alternatif yang memberikan kebebasan dan penghargaan kepada guru untuk berkreasi dalam membelajarkan peserta didik walaupun guru kurang mendapat imbalan finansial yang memuaskan.

Penyelenggaraan pendidikan di sekolah tidak terlepas dari unsur pengawasan dari pihak Pemerintah ataupun Yayasan pembina sekolah swasta. Pengawasan yang kaku dengan mengacu secara ketat pada ketentuan-ketentuan baku dapat menghambat prakarsa sekolah, baik kepala sekolah maupun guru. Hal ini terlihat dari pengawasan terhadap penggunaan dana BOS dan BOP yang mengakibatkan banyak sekolah

gang terlalu hati-hati dan cenderung watir menggunakannya karena sejumlah peraturan yang sangat mengikat. Pengawasan terhadap pelaksanaan dan pengembangan kulum yang terlalu ketat mengacu mada petunjuk pelaksanaan atau netuniuk teknis, sementara kondisi sekolah berbeda-beda, mengurangi makarsa guru untuk melakukan mernatif-alternatif pendekatan, metode, atau teknik pembelajaran. Namun di daerah tertentu yang atan pengawasan dilakukan lebih besifat luwes, membimbing, dan mendorong guru lebih profesional melaksanakan tugasnya, dapat memotivasi guru untuk berprakarsa mengatasi masalah-masalah belajaran serta berusaha meningmutu hasil belajar peserta

Kebijakan desentralisasi secara

sional mempengaruhi kebijakan

dikan di masing-masing daerah.

beberapa daerah kebijakan dan

hatian Pemda pada pengem
mgan pendidikan mendorong

hah berprestasi dan bersaing

ara sehat. Sebagai ilustrasi,

dapat kebijakan Pemda yang

mgkinkan sekolah mengguna
dana BOS dan BOP sesuai

mgan kebutuhan dan program

kebutuhan dan program

hatah. Bahkan ada Pemda yang

memberikan bantuan dana dan/atau sarana pendidikan tambahan untuk meningkatkan mutu pelayanan sekolah. Kebijakan yang demikian ternyata mendorong sekolah berlomba berprakarsa untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu lulusannya. Akan tetapi sebaliknya, Pemda yang belum memberikan prioritas atau perhatian yang cukup besar pada sektor pendidikan, prakarsa sekolah terkesan terpasung.

4.4 Faktor Pendukung dan Penghambat

Penelitian ini mengidentifikasi faktorfaktor pendukung dan penghambat prakarsa sekolah dalam meningkatkan mutu proses pembelajaran sebagai berikut.

- Kebijakan meliputi kebijakanPemerintah dan pemerintah daerah, kebijakan Dinas Pendidikan setempat, dan kebijakan sekolah
- 2). Partisipasi masyarakat
- Sarana pendidikan termasuk perpustakaan, laboratorium, saran olah raga dan sarana pendukung lainnya.

Kebijakan, partisipasi, dan sarana pendidikan yang mendukung akan dapat menumbuhkembangkan prarakarsa sekolah dan sebaliknya.

4.5 Diskusi

Hasil penelitian ini menunjukkan, walaupun prakarsa diartikan beraneka ragam, pada umumnya kepala sekolah dan guru memahaminya dalam pengertian sempit. Prakarsa dimaknai sebagai tindak lanjut yang dilakukan sekolah setelah menerima masukan dari pihak lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1994), prakarsa berarti inisiatif yang datang dari diri seseorang untuk melakukan sesuatu. Berprakarsa berarti melakukan sesuatu atas inisiatif sendiri sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya, dipengaruhi oleh tergantung pada orang lain. Dalam konteks pendidikan di sekolah, prakarsa itu dapat berasal dari kepala sekolah, guru, peserta didik, orang tua, komite sekolah, atau pemerintah daerah. Akan tetapi prakarsa sekolah dalam penelitian ini difokuskan pada prakarsa yang berasal dari kepala sekolah dan guru dalam meningkatkan mutu pembelajaran dan bukan mutu hasil pembelajaran. Proses pembelajaran dianggap sebagai faktor kuat untuk menghasilkan hasil pembelajaran yang bermutu. Dengan meningkatnya mutu proses pembelajaran diharapkan pada gilirannya terjadi juga peningkatan mutu hasil pembelajaran.

Pentingnya prakarsa sekolah ini dapat dimengerti karena pada hakikatnya pelaksanaan operasional pembelajaran terjadi di sekolah, lebih khusus lagi di dalam kelas, dan peranan kepala sekolah dan guru ikut menentukan keberhasilannya. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan di semua jenis dan jenjang pendidikan. Akan tetapi penyediaan dana, sarana, serta tenaga kependidikan dan guru tidak akan dapat meningkatkan mutu pendidikan secara optimal apabila tidak dibarengi dengan tumbuh serta berkembangnya prakarsa pada akar rumput tempat berlangsungnya proses pendidikan itu sendiri yaitu sekolah.

Prakarsa sekolah mencakup inisiatif sekolah dalam mencari dan mendayagunakan secara optimal sumber-sumber daya pendidikan yang baru dan yang telah ada dalam bentuk sarana, prasarana, dana, dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar-membelajarkan baik di lingkungan maupun di luar sekolah. Dengan demikian, prakarsa sekolah itu ditunjukkan secara nyata oleh guru, tenaga kependidikan, serta kepala sekolah sebagai pemimpin dan manajer di tingkat sekolah. Prakarsa

sekolah itu dapat juga mengikutsertakan atau mendapat dukungan dari komite sekolah, orang tua, dan masyarakat setempat.

Prakarsa sekolah ternyata dapat mengatasi berbagai masalah pendian seperti kekurangan dana yang Sediakan Pemerintah atau Yayasan, keterbatasan sarana dan sumber belajar, kenakalan peserta didik, kekurangan pendidik dan tenaga kependidikan. Bahkan prakarsa sekolah dapat meningkatkan proses belajar-membelajarkan sehingga sasana belajar menjadi lebih hidup am lebih menyenangkan dan peserta fidik menjadi lebih tertarik serta lebih ermotivasi belajar sehingga mutu hasil belajar lebih meningkat. Hal ini erlihat sekali di SLTP Terbuka Oaryah Thayyibah yang terletak di desa Kalibening, Kecamatan Tingkir, Salatiga, Jawa Tengah. Berkat kerja teras pimpinan sekolah, para guru, am masyarakat setempat sekolah dengan biaya murah itu dikenal sampai ke mancanegara (Buletin Pasat Perbukuan, 2005: 16-18).

Akan tetapi hasil kajian ini menunjukkan bahwa prakarsa ipahami dan dilaksanakan oleh masing-masing sekolah secara berbeda-beda. Kebanyakan sekolah ang mengartikan prakarsa itu mebatas pada upaya-upaya sekolah

mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan dana atau sarana dan prasarana pendidikan sehingga prakarsa yang dilakukan mengarah pada hal-hal yang berkaitan dengan menajemen sekolah. Sementara itu, sejumlah kecil sekolah memfokuskannya pada penerapan dan pengembangan kurikulum seperti menerapakan teknik-teknik yang kreatif dalam belajar-membelajarkan, pemanfaatan sumber-sumber belajar dan evaluasi. Namun, terdapat juga beberapa sekolah yang melakukan prakarsa mencakup aspek manajemen sekolah serta aspek penerapan dan pengembangan kurikulum.

Pebedaan jenis dan kualitas prakarsa antarsekolah nampaknya dipengaruhi oleh status sekolah seperti negeri dan swasta, kebijakan piminan daerah setempat, figur kepala sekolah, pendidik, kategori sekolah, dan lingkungan sekolah. Sekolah negeri ternyata lebih berhati-hati dalam melakukan prakarsa dalam manajemen dan penerapan kurikulum jika dibandingkan dengan sekolah swasta. Sekolah negeri nampaknya khawatir prakarsa itu bertentangan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sehingga dapat berdampak pada sanksi kepada sekolah itu sendiri. Dengan demikian kebijakan melakukan manajemen berbasis sekolah dengan memberikan kewenangan kepada sekolah untuk mengelola pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan setempat belum sepenuhnya menjamin menumbuhkan dan mengembangkan prakarsa sekolah.

Kebijakan desentralisasi pengelolaan pendidikan ke daerah bermaksud agar penyelenggaraan pendidikan itu lebih menyatu dengan masyarakat dan lingkungan setempat dalam arti tujuan dan isi pendidikan di sekolah memperhatikan kebutuhan, keadaan, dan peran serta masyarakat di sekitarnya di samping berorientasi pada tujuan pendidikan nasional. Pendidikan yang bermutu antara lain ditentukan bagaimana lembaga pendidikan itu, dalam hal ini sekolah, dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan lingkungannya (Sallis, 1994: 12). Akan tetapi, apabila kewenangan yang diperoleh sekolah untuk mengelola proses pembe-lajaran tidak dapat mendorong prakarsa kepala sekolah dan guru karena berbagai kekhawatiran atas resiko peraturan dan ketentuan yang ada maka pelimpahan wewenang ke sekolah dalam manajemen berbasis sekolah kurang dapat meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran.

Pengalokasikan dana langsung ke sekolah melalui *Block Grant* dan

BOS disertai dengan ketentuanketentuan penggunaan dan pertanggungjawaban yang ketat dengan tujuan agar dana itu dipergunakan tepat sasaran dan efisien, malah membuat sekolah menjadi kaku dalam melaksanakan programnya dan tidak termotivasi melakukan prakarsa mengembangkan kegiatan pendidikan di sekolahnya. Kondisi seperti ini terlihat di sekolah tertentu yang mengurangi kegiatan pendidikannya karena dana BOS tidak dapat mendukung kegiatan yang sebelumnya didanai dengan sumber-sumber yang diprakarsai sekolah atas persetujuan Komite Sekolah. Sekolah yang mengalami keadaan yang demikian menunjukkan gejala kurangnya pemahaman kepala sekolah dan pemerintah daerah serta Dinas Pendidikan atas hakikat dan tujuan penyediaan dana melalui Block Grant dan BOS itu. Dilihat dari aspek sekolah berarti lingkup wewenang (discretion of power) yang diberikan pada sekolah kurang dipahami. Dilihat dari pemerintah daerah atau Dinas Pendidikan, kebijakan desentralisasi pengambilan keputusan dalam pengelolaan keputusan kurang dimaknai sebagaimana cara untuk memberdayakan sekolah sesuai dengan keadaan dan permasalahan

ang dihadapinya. Penyerahan wenang ke organisasi tingkat belaksana (sekolah), diharapkan belaksana dengan keputusan dapat dilamkan dengan cepat dan tepat sesuai belaksan keadaan yang dihadapi tanpa belaksan tujuan organisasi belaksan masional), sehingga penyemgaraan organisasi (sekolah) dapat belaksan dan efektif. (Simon, 1997:

Sementara itu, sekolah swasta memiliki kebebasan yang lebih luas keberanian yang lebih besar melakukan prakarsa dengan meningkatkan pelayanan dan pendidikan untuk mempermakan serta meningkatkan eksisessi dan popularitasnya. Keweman yang dimiliki swasta mengepenyelenggaraan pendidikan di alahnya lebih luas dari sekolah Sekolah swasta lebih peka masyarakat dan mekungannya lincah melakukan mutuk meningkatkan mutu mayanan kepada pelanggannya. sekolah swasta tertentu, bandana yang diberikan Pemerintah maggapi sebagai pemicu untuk mesembangkan kegiatannya sedapat memberikan pelayanan lebih baik serta meningkatkan pendidikannya. Akan tetapi and pat juga sekolah swasta yang

enggan menerima bantuan itu karena ketentuan-ketentuan dan sanksi yang menyertai dana bantuan itu dianggap merepotkan, padahal sekolah tersebut memiliki sumber dana yang memadai untuk melakukan berbagai prakarsa dalam meningkatkan mutu. Sekolah swasta cenderung lebih cekatan menerapkan prinsip-prinsip organisasi belajar (Marquardt: 1996: 2) dan menjaga keseimbangan (equilibrium) organisasi (sekolah) sehingga dapat bertahan, berkembang dan bersaing dengan tetap mengedepankan efisiensi (Simon: 1997:147)

Kedudukan dan peranan pengambil kebijakan di daerah ternyata turut serta menentukan tumbuh dan berkembangnya prakarsa sekolah. Kepala daerah yang memberikan perhatian besar terhadap pendidikan dengan memberikan kemudahankemudahan dan dukungan kepada sekolah untuk kreatif mengembangkan dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki sekolah, ternyata membuat sekolah lebih bebas dan leluasa secara kompetitif meningkatkan mutu proses dan hasil belajar di sekolah melalui berbagai prakarsa yang dilakukan oleh kepala sekolah dan guru. Sikap pimpinan daerah yang lebih bersifat membina daripada mengawasi itu ternyata juga dapat memberdayakan komite sekolah serta

orang tua dan masyarakat sekitar memberikan dukungan atas kegiatankegiatan yang diprakarsai oleh sekolah untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Sementara itu, pimpinan daerah yang cenderung bersifat mengawasi dengan menggunakan ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan secara kaku serta kurang memperdulikan kondisi dan masalah-masalah di sekolah, dapat membendung kreativitas dan prakarsa sekolah untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Bahkan, beberapa sekolah tidak mampu menghabiskan dana bantuan operasional sekolah karena ketat dan kakunya aturan pemakaiannya.

Figur kepala sekolah sebagai pemimpin dan manajer di sekolah memberikan pengaruh yang besar dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah khususnya dalam proses belajar dan membelajarkan (Sallis, 1994:86-87). Kepala sekolah yang demokratis serta memberikan keleluasaan kepada dan/atau mendorong masing-masing pendidik untuk berimprovisasi dalam membelajarkan peserta didik dapat mengungkit kreativitas mereka. Bahkan, di sekolah tertentu, kepala sekolah menyediakan forum khusus kepada pendidik untuk melakukan diskusi menemukan berbagai alternatif pemecahan masalah belajar-membelajarkan di dalam kelas

sehingga peningkatan mutu proses dan hasilnya dapat dilakukan secara berkesinambungan. Berkembangnya prakarsa guru sebagai hasil dari pola kepemimpinan kepala sekolah lebih lanjut mendorong kepala sekolah untuk lebih kreatif membina dan meningkatkannya. Namun di sekolah yang kepala sekolah mengutamakan kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan yang mengalir melalui garis komando melahirkan pola kepemimpinan yang baku dan kaku sehingga kurang bahkan sering tidak memacu prakarsa guru dan kepala sekolah sendiri untuk mengatasi masalahmasalah belajar-membelajarkan di sekolah dan upaya peningkatan mutu dan hasil pembelajaran mengalami kemandegan.

Kegiatan belajar-membelajarkan secara nyata dapat dilihat di lingkungan sekolah, khususnya di ruang kelas melalui interaksi antara guru dan peserta didik dengan menggunakan berbagai sumber belajar. Di kebanyakan sekolah swasta terlihat berbagai prakarsa guru dalam meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran. Akan tetapi di kebanyakan sekolah negeri terlihat bahwa sungguhpun secara teoritis guru mengetahui berbagai pendekatan, metode, dan teknik belajarmembelajarkan secara umum, dalam pelaksanaan di kelas ternyata belum

begtu terlihat prakarsa guru meningkatkan mutu pembelajaran yang sungguh-sungguh mengacu pada karakteristik peserta didik, kondisi ruang belajar/kelas, karakterisik bahan ajar, dan tujuan pembelajaran. Peranan guru ternyata masih menonjol, metode pembelajaran masih kurang bervariasi, pemanfaatan sumber-sumber belajar masih terbatas, pengelolaan kelas belum menciptakaan suasana dan pengalaman belajar yang dinamis dan menyemangkan, serta teknik evaluasi yang masih konvensional. Dalam keadaan wang demikian sulit dapat diharapkan berjadi peningkatan mutu pembelajaran.

Dilihat dari fungsinya sekolah dapat dikategorikan sebagai sekolah reguler, binaan proyek, koalisi, atau enis lain seperti sekolah alternatif, sekolah unggulan, dan sekolah sseleratif. Dilihat dari prakarsa sekolah ternyata sekolah-sekolah wang berfungsi sebagai sekolah reguler cenderung melakukan egiatan belajar-membelajarkan secara rutinitas serta tidak mengalami peningkatan mutu yang berarti. Berbeda dengan sekolah yang dibina aleh proyek atau koalisi, yang melakukan berbagai improvisasi dalam meningkatkan mutu proses dan belajar-membelajarkan karena

guru dan kepala sekolah diberikan kewenangan dan kemudahan dalam melakukan dan mengembangkan prakarsa. Bahkan di daerah tertentu, Pemerintah Daerah memberikan kemudahan-kemudahan kepada sekolah binaan proyek itu agar dapat lebih berkembang dan bermutu sehingga dapat dijadikan sebagai model. Hal ini terlihat di sekolahsekolah binaan *Managing Basic Education* (MBE) di Jakarta dan di beberapa daerah di Indonesia (Suara MBE, 2006).

Lokasi dan lingkungan sekolah ternyata tidak menentukan keberanekaragaman dan kualitas prakarsa yang dilakukan sekolah. Di sejumlah sekolah yang berlokasi di pedesaan dan masyarakatnya tidak begitu peduli dengan mutu pendidikan, terlihat menonjol prakarsa sekolah untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan pengaruhnya kemudian tertular ke sekolah sekitarnya, bahkan merambat ke sekolah perkotaan. Tetapi di daerah pedesaan juga terdapat sekolah yang tidak menunjukkan prakarsa yang berarti. Sementara itu, di sekolah perkotaan yang masyarakat sekitarnya cukup peduli terhadap pendidikan yang bermutu, tidak selalu terlihat prakarsa sekolah yang bertujuan meningkatkan mutu pembelajaran. Di sekolah

tertentu di daerah perkotaan juga terlihat semarak dengan berbagai prakarsa. Temuan penelitian ini tidak berbeda dengan yang terjadi di sekolah-sekolah binaan MBE di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur (Suara MBE, 2006)

Kesimpulan penelitian ini yang antara lain menyatakan bahwa tumbuh dan berkembangnya prakarsa kepala sekolah dan guru dalam meningkatkan mutu proses pembelajaran banyak tergantung pada kepedulian dan komitmen pengambil keputusan terhadap pentingnya pendidikan bermutu untuk dalam membangun masyarakat Indonesia yang beriman, beriman dan bertanggung jawab. Kesimpulan demikian adalah masuk diakal mengingat kultur masyarakat Indonesia yang pada umumnya masih berorientasi ke atas atau pimpinan. Berbagai prakarsa dapat berkembang dan berhasil apabila didukung oleh pimpinan dan unsur pengawas, dan kondisi sebaliknya juga sering terjadi.

Secara keseluruhan dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian ini menganggap bahwa prakarsa sekolah sangat penting dalam mengatasi masalah-masalah pembelajaran serta meningkatkan mutu proses pembelajaran di sekolah. Akan tetapi, prakarsa tersebut belum tumbuh dan

berkembang di semua sekolah karena berbagai hambatan yang erkaitan dengan manajemen sekolah, tenaga kependidikan, dana, sarana dan prasarana, partisipasi masyarakat, pengawasan dan pembinaan. Oleh karena itu, apabila prakarsa sekolah ingin ditumbuhkembangkan maka perlu penyempurnaan pada unsurunsur tersebut.

Berorentasi ke atas itu pulalah antara lain yang membuat kepala sekolah dan guru cenderung bersifat menunggu penjelasan dan petunjuk teknis dalam menjalankan suatu kebijakan. Sikap yang seperti ini dapat juga terjadi karena kekurangmampuan berprakarsa akibatnya pengetahuan dan pengalaman yang minim. Situasi yang demikian ini mendorong peneliti menyarankan perlunya peningkatan kualitas mutu guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan lainnya, komite sekolah, aparatur Dinas Pendidikan dan pemerintah daerah yang terkait dengan pengelolaan pendidikan. Namun, penelitian ini belum memberikan saran bagaimana upaya peningkatan mutu sumber daya manusia yang dimaksud dilaksanakan secara operasional. Berbagai pengalaman selama ini menunjukkan upayaupaya peningkatan mutu sumber daya manusia itu tidak secara

ctomatis dapat mengubah keadaan atau memecahkan masalah di sekolah. Namun, salah satu kemungkinan pemecahannya adalah melakukan peningkatan mutu sumber daya manusia secara terpadu, terintegrasi, terkoordinasi dan komprehensif. Melakukan pekerjaan yang demikian merupakan tantangan berat, mengat besarnya jumlah yang terlibat manusia serta keberanekaragaman mayah Indonesia.

Diakui oleh penelitian ini bahwa muan yang disajikan merupakan Emomena yang terjadi di 28 sekolah a sembilan propinsi dan hasil penelitian ini tidak dimaksudkan mtuk melakukan generalisasi. Sungguhpun demikian, hasil peneliini dapat memberikan potret mang unsur-unsur yang mempengmhi tumbuhkembangnya prakarsa an guru. Di samping menjadi bahan pertimbangan pengambil keputusan kebijakan mengkat Pusat dan daerah termasuk sholah, laporan penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk melakukan peneltian lebih lanjut di jenjang dan pendidikan yang sama ataupun jenjang dan jenis pendidikan lebih tinggi. Nampaknya melitian tentang prakarsa sekolah banyak dilakukan di Indonesia. walaupun laporan-laporan tentang

prakarsa sekolah mengatasi berbagai masalah pembelajaran tidak jarang di muat di berbagai media.

Simpulan, Implikasi, dan Rekomendasi

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil kajian, penelitian ini menyimpulkan hal-hal berikut.

Pengertian prakarsa ditanggapi secara beraneka ragam oleh sekolah. Kebanyakan sekolah menganggap prakarsa sebagai adanya masukan dari luar, baik dari Dinas Pendidikan stempat, dari pemimpin proyek, atau dari pimpinan yayasan yang menaungi sekolah.

Pada semua sekolah swasta yang dikaji, prakarsa untuk meningkatkan mutu pembelajaran telah dan sedang berlangsung. Mereka beranggapan bahwa berkembangnya sekolah mereka bergantung pada penjaminan mutu pendidikan yang diberikan sekolah.

Sebagian sekolah negeri telah berprakarsa untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan sebagaian lagi sulit berprakarsa untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Sekolah negeri yang berprakarsa atau memiliki keberdayaan untuk meningkatkan mutu pembelajaran bercirikan: (a) memiliki pemangku kepentingan (stakeholder) yang memahami betul masalah pendidikan dengan seluk

beluknya serta berkomitmen untuk bersikap proaktif dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, (b) mendapatkan dukungan dari Pemerintah Daerah, (c) mempunyai kepemimpinan sekolah yang visioner dan berdedikasi tinggi, dan (d) memiliki guru-guru yang kompeten dan terbuka untuk pembaharuan.

Sedangkan sekolah yang sulit berprakarsa disebabkan oleh: (a) kurang kuatnya komitmen pemangku kepentingan (stakeholder), (b) kendala kebijakan yang mengkaitkan aturan standar dengan pemberian bantuan, (c) kurang dipahaminya masalah-masalah dan tuntutan pendidikan, dan (d) kurang kuatnya kepemimpinan, dan (e) sikap mental guru yang terwujud dengan keengganan untuk mengubah kebiasaan.

Sekolah-sekolah yang kurang menunjukkan prakarsa untuk mengadakan usaha peningkatan mutu pembelajaran, pada umumnya mengungkapkan dua alasan. Pertama, prakarsa selalu memerlukan masukan dana tambahan, padahal dengan diterimanya BOS, sekolah tidak diperbolehkan mengutip uang dari peserta didik. Sementara dana BOS hanya untuk menyelenggarakan kegiatan rutin. Kedua, walaupun prakarsa tersebut didukung oleh dan bahkan berasal dari Komite Sekolah, masih ada anggapan bahwa selama

dana berasal dari orang tua peserta didik, maka prakarsa tersebut tidak diperbolehkan. Kalau dilanggar, ada kekhawatiran akan terdapat sanksi dari Dinas, karena dianggap tidak sejalan dengan kebijakan.

Prakarsa sekolah hanya dapat berkembang dan berkelanjutan bilamana mendapat dukungan penuh dan komitmen dari para pemangku kepentingan.

Masih banyak Komite Sekolah berperan dan berfungsi sebagai kelanjutan dari POMG, sehingga belum berjalan sebagaimana mestinya.

5.2 Implikasi

Kesimpulan tersebut di atas mengandung implikasi bahwa meskipun peningkatan proses pembelajaran merupakan kunci pokok dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, ada sejumlah faktor lain, baik di dalam maupun di luar sekolah yang perlu mendapat perhatian. Faktor-faktor tersebut meliputi: (a) manajemen sekolah, (b) tenaga kependidikan, (c) dana, (d) sarana dan pasaran, (e) partisipasi masyarakat, dan (f) pengawasan dan pembinaan.

Sebagai suatu organisasi yang harus berkembang, sekolah perlu dikelola sebagai suatu organisasi belajar. Tenaga kependidikan, khususnya guru, diharapkan memiliki bomitmen dalam membangun pen-Edikan di samping mempunyai competensi profesional. Untuk penyelenggaraan pendidikan di skolah, Pemerintah dan pemerintah merah perlu menyediakan dana yang dan diberikan keluwesan untuk mengelolanya sesuai dengan keadan kebutuhan sekolah. Di amping itu perlu pula disediakan sarana dan prasarana pendidikan memungkinkan sekolah melamkan pembaharuan dalam penyeenggaraan pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan peserta alam berbagai aspek. Sekolah mediri perlu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya dan meniadikan kebutuhan serta nilai-nlai berlaku di masyarakat pedoman mlam pembangunan sekolah. Teakhir, pengawasan dan pembina secara berkelanjutan bersifat mendidik, serta dengan mengedepankan sentuhan manusiawi membangkitkan semangat komunitas sekolah optimal bagi nendidik.

Rekomendasi

bersifat deskriptif-analitis yang bersifat deskriptif-analitis yang bersifat dengan daya atau kemamsekolah dalam memulai dan bersidaklanjuti usaha peningkatan proses pembelajaran. Oleh

karena itu direkomendasikan beberapa hal berikut.

Pertama, perlu diipertimbangkan berbagai kebijakan yang terkait dengan pemberdayaan sekolah, agar sekolah dapat lebih kreatif dalam dalam rangka usahanya untuk menghasilkan lulusan yang bermutu.

Kedua, hendaknya diusahakan tersedianya pedoman lebih lanjut mengenai penerapan berbagai strategi pembelajaran yang dapat mewujudkan belajar yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, mengembangkan prakarsa, kreativitas, dan kemandirian, memberi keteladanan, mengembangkan budaya untuk belajar, mengembangkan budaya untuk belajar, mengembangkan kerjasama dan kompetisi untuk mencapai prestasi, serta memanfaatkan aneka sumber relajar.

Ketiga, diberdayakannya tenaga kependidikan melalui peningkatan kompetensi mereka secara integral sehingga ada kesamaan persepsi dan tindakan dalam peningkatan mutu proses pembelajaran.

Keempat, dilakukan pengkajian lebih lanjut secara mendalam mengenai kebijakan dan langkahlangkah yang diperlukan agar iklim dan semangat untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran dapat terwujud.

Pustaka Acuan

Belt, S. 1999. Emerging vision of an information age education. http://victorian.fortunecity.com/vangogh/555/NSU/infoajed

Cunningham, W.G. & Cordeiro. P.A. 2003. Educational leadership: A problem-based approach. Boston: Pearson Education.

Ellul, J. 1967. The technological society. New York: Alfred A. Knopf.

Gelsthorpe, T. & West-Burnham, J. (Eds). 2003. Educational leadership and the community: Strategies for school mprovement through community engagement. London: Pearson Education.

Gilley, J.W. & Eggland, S.A. 1989. Principles of human resource development. Reading, MA: Addison-Wesley Publishing Co.

Himpunan peraturan perundang-undangan: Standar nasional pendidikan. 2005. Jakarta: Fokusmedia.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1994. Jakarta: Balai Pustaka

Marquardt, M. J. 1996 Building the learning organization. New York: McGraw-Hill.

Miarso, Y. 2004. *Menyemai benih teknologi pendidikan*. Jakarta: Kencana bekerjasama dengan Pustekom Diknas.

Morrison, D.M., Mohaski, K.& Cotter, K. 2005. Instructional quality indicators research foundations. Cambridge, MA: Connect

Sallis, E. 1994. *Total quality managemen in education*. Philadelphia: Kogan Page.

Simon, H.A. 1997. Administrative behavior: A Study of a decision making processes in administrative educations. New York: The Free Press.

SLTP Terbuka Quariah Thayyibah: Sekolah 'Global" di kaki gunung Merbabu. 2005, Januari-Juni. *Buletin Pusat Perbukuan*. P. 16-18.

Staf Ahli Mendiknas Bidang Mutu Pendidikan Nasional. 2006. Laporan kajian penelitian prakarsa sekolah dalam meningkatkan mutu proses pendidikan. Jakrta: Departemen Pendidikan Nasional

Suara MBE. 2006, April. Jakarta: RTI International.

Toffler, A. 1981. The third wave. London: Penguin Books.

UUD 1945: Hasil amandemen & proses amandemen UUD 1945 secara lengkap (pertama 1999 – Keempat 2002). (2002). Jakarta: Sinar Grafika